

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

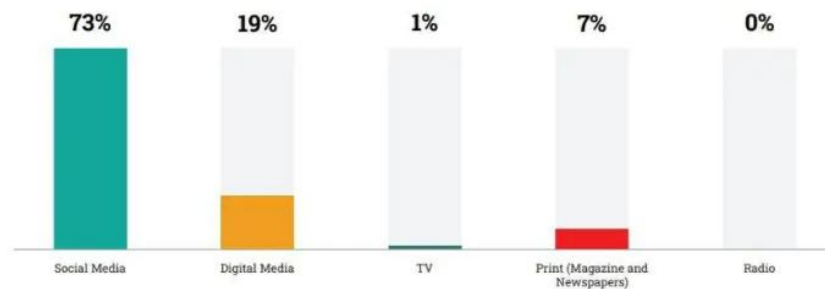
Dalam kajian komunikasi politik kontemporer, politik tidak lagi dipahami semata-mata sebagai aktivitas yang berlangsung dalam institusi formal seperti partai politik, parlemen, atau pemilu. Politik juga beroperasi sebagai praktik budaya yang diproduksi, disirkulasikan, dan dimaknai melalui simbol, narasi, serta representasi yang hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Makna politik dibentuk melalui proses representasi kultural, di mana media dan praktik budaya memiliki peran sentral dalam membingkai realitas sosial dan politik. Dengan demikian, ruang politik tidak hanya berada di ranah kebijakan, tetapi juga dalam arena budaya populer.

Budaya populer semakin menempati posisi strategis sebagai medium komunikasi politik. John Street menyatakan bahwa budaya populer termasuk musik, film, hiburan, dan komedi tidak sekedar menjadi refleksi politik, melainkan juga arena tempat nilai, ideologi, dan sikap politik dinegosiasikan (Street, 1997). Dalam konteks ini, politik mengalami pergeseran bentuk penyampaian, dari yang bersifat formal dan elitis menuju format yang lebih informal, emosional, dan dekat dengan pengalaman keseharian audiens.

Dalam konteks tersebut media sosial saat ini telah menjadi ruang utama untuk memperoleh dan berbagi informasi khususnya di Indonesia. Berdasarkan laporan Digital 2025 Indonesia, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai sekitar 143 juta pengguna atau setara dengan 50,2% dari total populasi. Dari jumlah tersebut, sekitar 126 juta pengguna merupakan kelompok usia 18 tahun ke atas, yang menunjukkan dominasi kelompok usia dewasa dalam penggunaan media sosial. Selain itu, media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai media hiburan (57,5%) dan untuk mengikuti isu-isu yang sedang berkembang (50%), termasuk isu politik (Kemp, 2025). Tingginya intensitas penggunaan media sosial yang mencapai rata-rata lebih dari 3 jam per hari menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi ruang utama dalam

membentuk cara masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memahami realitas sosial dan politik. Kondisi ini menjadikan media digital sebagai ruang utama dalam memperoleh dan mengonsumsi informasi, termasuk informasi politik, sehingga terjadi pergeseran dari pola komunikasi politik yang bersifat formal menuju komunikasi yang lebih informal dan berbasis budaya populer. Pergeseran tersebut tidak hanya menunjukkan perubahan pada saluran komunikasi politik, tetapi juga mencerminkan transformasi dalam perilaku konsumsi informasi di kalangan generasi muda sebagai kelompok pengguna utama media digital. Dalam konteks ini, generasi muda tidak lagi menjadikan media konvensional sebagai sumber utama informasi, melainkan lebih mengandalkan media sosial yang dinilai lebih cepat, praktis, dan sesuai dengan preferensi mereka.

Generasi Z yang lahir pada tahun 1997–2012 saat ini merupakan kelompok generasi terbesar di Indonesia, dengan jumlah mencapai 27,94% dari total populasi atau sekitar 74,93 juta jiwa, bahkan melampaui generasi milenial yang berada di posisi kedua dengan 25,87% atau sekitar 69,38 juta jiwa. Besarnya jumlah generasi Z tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini memiliki peran yang signifikan dalam membentuk arah konsumsi informasi di Indonesia, termasuk dalam konteks informasi politik. Dominasi populasi ini tidak hanya berdampak pada kuantitas pengguna media, tetapi juga memengaruhi pola preferensi dalam mengakses dan memilih sumber informasi yang dianggap relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup mereka. Hal ini sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh IDN Research Institute bekerja sama dengan Advisia dalam laporan Indonesia Gen Z Report (IMGR) 2024, yang menunjukkan bahwa generasi Z cenderung lebih tertarik memperoleh informasi melalui media sosial dibandingkan media cetak maupun televisi (Wisesa, 2023).



Gambar 1. 1 Statistik Minat Gen Z Dalam Memperoleh Informasi

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa generasi muda cenderung mengonsumsi informasi politik melalui media sosial dibandingkan melalui sumber informasi formal. Studi mengenai pola bermedia Generasi Z menunjukkan bahwa media sosial menjadi sumber utama dalam memperoleh informasi politik, dengan karakter konsumsi yang bersifat insidental serta lebih menyukai konten yang ringan, visual, dan mudah dipahami (Evita, 2023). Selain itu, data survei terbaru juga menunjukkan bahwa sebagian besar generasi muda secara aktif mengikuti isu politik melalui media sosial, yang menegaskan pergeseran media digital sebagai ruang utama dalam pembentukan pemahaman politik (Husein, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa proses pemahaman politik di kalangan generasi muda tidak hanya dibentuk oleh informasi yang bersifat faktual, tetapi juga oleh cara penyampaian pesan yang menarik dan menghibur.

Dalam konteks tersebut, komedi politik muncul sebagai salah satu bentuk komunikasi alternatif yang semakin berkembang, khususnya melalui platform digital seperti YouTube, Instagram, Tiktok dan lainnya. Komedi politik tidak hanya berfungsi sebagai hiburan bagi generasi muda, tetapi juga menjadi medium penyampaian kritik terhadap isu-isu sosial dan politik melalui pendekatan humor, ironi, dan satire. Penyajian pesan politik dalam bentuk yang ringan dan menarik membuat komedi politik berpotensi menjadi sarana edukasi politik yang lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama generasi muda yang cenderung menghindari informasi politik yang bersifat formal dan kaku.

Salah satu bentuk komedi politik yang cukup populer di Indonesia adalah *Stand-up Comedy* khususnya *Special Show Mens Rea: Dijamin Tanpa Mens Rea* karya Pandji Pragiwaksono yang mengangkat isu sosial dan politik. *Mens Rea* disini merupakan istilah dari bahasa latin yang artinya niat jahat. Istilah *Mens Rea* digunakan sebagai benang merah pertunjukan untuk menggambarkan dugaan niat jahat di balik pembuatan dan penggunaan jabatan. Pertunjukan ini didistribusikan melalui platform digital Netflix, sehingga dapat diakses secara luas oleh audiens, khususnya generasi muda yang aktif mengonsumsi konten melalui media daring. Dalam *Special Show* ini, Pandji tidak hanya menyampaikan humor, tetapi juga menyampaikan beberapa kritik melalui satire seperti contoh ketika ia sedang membahas kinerja wakil presiden seperti Jusuf Kalla, Boediono, serta Ma'ruf Amin. Dalam bahasan tersebut Pandji menyampaikan satire dengan mengatakan “Ma'ruf Amin pasti kerja, pasti kerja dong, emangnya doain rakyat bukan kerja”, yang secara implisit mengandung kritik terhadap persepsi publik mengenai peran dan kontribusi wakil presiden.

Dalam pertunjukan tersebut, Pandji mengatakan poin utama yang dibahas adalah kriteria memilih pemimpin jangan hanya satu saja, Pandji juga menyampaikan pernyataan bahwa tujuan utamanya adalah “mengubah masyarakat Indonesia, bukan pemerintah”, yang mengindikasikan adanya intensi untuk memengaruhi cara berpikir dan sikap politik audiens. Pernyataan ini menempatkan komedi tidak sekadar sebagai hiburan, melainkan sebagai medium yang secara sadar diarahkan pada perubahan kesadaran politik. Oleh karena itu, *Mens Rea* dipilih sebagai objek penelitian karena merepresentasikan komedi politik yang secara eksplisit mengandung humor, satire, dan kritik terhadap isu politik kontemporer di Indonesia.



Gambar 1. 2 Poster Special Show Mens Rea

Namun, dalam perspektif komunikasi budaya, intensi komunikator tidak selalu sejalan dengan makna yang diterima oleh audiens. Hall mengemukakan bahwa terdapat tiga posisi khlayak dalam memaknai pesan media, yaitu dominant-hegemonic, negotiated, dan oppositional. Ketiga posisi tersebut menunjukkan bahwa audiens tidak selalu menerima pesan media secara pasif, melainkan dapat menafsirkan pesan sesuai dengan pengalaman dan latar belakang sosial yang dimilikinya (Ariestyani & Ramadhanty, 2022). Maka dari itu dapat dikatakan bahwa pesan media bersifat polisemi dan dapat dimaknai secara berbeda oleh audiens tergantung pada latar belakang sosial, budaya, dan ideologis mereka. Dengan demikian, terdapat kemungkinan adanya kesenjangan antara niat politik komedian dengan dampak aktual yang dirasakan oleh audiens.

Demikian di balik potensinya sebagai media edukasi politik, komedi politik juga memunculkan persoalan yang tidak sederhana. Penyampaian kritik politik melalui humor berpotensi menggeser cara audiens dalam memaknai isu-isu politik, di mana kritik yang disampaikan dapat dipersepsikan tidak lagi sebagai sesuatu yang serius, melainkan sebagai bagian dari hiburan semata. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kemungkinan terjadinya normalisasi kritik

politik, yaitu ketika kritik terhadap kekuasaan dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak lagi mendorong refleksi atau kesadaran politik yang mendalam.

Kajian akademik menunjukkan bahwa humor dan komedi politik memiliki sifat yang ambivalen. Di satu sisi, humor dapat berfungsi sebagai sarana kritik dan refleksi sosial, namun di sisi lain juga berpotensi menyamarkan atau mereduksi kompleksitas persoalan politik menjadi bentuk yang lebih ringan dan menghibur. Studi mengenai parodi politik menunjukkan bahwa humor justru menghasilkan makna yang ambigu dan tidak tunggal dalam pemaknaan politik audiens (Petrovic, 2018). Selain itu, penelitian lain juga menegaskan bahwa humor dapat mengaburkan aspek negatif dari isu politik sehingga berpotensi melemahkan daya kritis audiens (Beck & Spencer, 2025). Critchley (2002) menekankan bahwa tawa tidak selalu bersifat subversif; dalam kondisi tertentu, humor justru dapat menormalkan ketimpangan dan kegagalan politik dengan cara membuatnya terasa biasa dan dapat ditertawakan (Quirk, 2016). (Billig, 2005) bahkan mengingatkan bahwa humor dapat berperan sebagai mekanisme sosial yang melemahkan daya kritis audiens ketika kritik tidak berlanjut pada refleksi atau tindakan politik yang nyata.

Ambivalensi inilah yang memunculkan perdebatan akademik mengenai kelayakan komedi sebagai medium edukasi politik. Sebagian penelitian cenderung menekankan potensi positif komedi politik dalam meningkatkan literasi dan partisipasi politik, sementara penelitian lain justru menggarisbawahi risiko depolitisasi dan penyederhanaan isu politik yang kompleks. Sayangnya, banyak kajian tersebut masih berfokus pada media Barat, seperti program satir televisi atau komedi politik di Amerika Serikat dan Eropa, sehingga konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Makna dari pesan politik yang disampaikan dalam komedi tersebut tidak bersifat tunggal. Dalam perspektif komunikasi budaya, audiens dipahami sebagai subjek aktif yang memiliki peran dalam memaknai pesan yang diterimanya. Oleh karena itu, satu teks komedi politik yang sama dapat menghasilkan beragam interpretasi, tergantung pada latar belakang, pengalaman, serta nilai-nilai yang dimiliki oleh audiens. Dalam konteks ini, muncul apa yang dapat disebut sebagai

dilema makna, yaitu kondisi di mana komedi politik dapat dimaknai sebagai sarana edukasi politik, tetapi di sisi lain juga dapat dipahami sebagai bentuk normalisasi kritik politik.

Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji karena pergeseran komunikasi politik ke dalam bentuk hiburan berpotensi memengaruhi kualitas pemahaman politik generasi muda. Jika komedi politik lebih dominan dipahami sebagai hiburan semata, maka terdapat risiko terjadinya penurunan sensitivitas terhadap isu-isu politik yang seharusnya dipahami secara kritis. Sebaliknya, jika komedi mampu berfungsi sebagai media refleksi, maka ia dapat menjadi sarana edukasi politik yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana audiens secara nyata memaknai komedi politik, sehingga dapat diketahui batas antara fungsi edukatif dan potensi normalisasi kritik dalam praktik komunikasi politik kontemporer.

Dalam upaya memahami dilema makna tersebut, penelitian ini memerlukan informan yang tidak hanya berperan sebagai penonton komedi politik, tetapi juga memiliki kapasitas untuk melakukan pembacaan kritis terhadap pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Mahasiswa aktivis dipilih karena mereka umumnya memiliki intensitas yang lebih tinggi dalam mengikuti perkembangan isu sosial dan politik, baik melalui aktivitas organisasi, forum diskusi, kajian, maupun keterlibatan dalam berbagai kegiatan advokasi. Pengalaman mereka dalam ruang-ruang diskursus menjadikan mahasiswa aktivis sebagai kelompok yang relatif terbiasa menginterpretasikan pesan politik serta menghubungkannya dengan konteks sosial yang lebih luas. Dengan demikian, pemaknaan yang mereka hasilkan terhadap komedi politik tidak hanya mencerminkan respons sebagai audiens hiburan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kesadaran kritis terhadap dinamika komunikasi politik yang berkembang di masyarakat.

Pemilihan mahasiswa aktivis UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai subjek penelitian didasarkan pada karakteristik sosial dan akademik yang dimiliki oleh lingkungan kampus tersebut. UIN SGD Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi dengan jumlah peminat yang tinggi, dengan lebih dari 106.000 pendaftar dan sekitar 7.400 mahasiswa yang diterima pada tahun akademik 2023/2024 (NU Bandung, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa UIN SGD memiliki

basis mahasiswa yang besar dan kompetitif. Selain itu, mahasiswa UIN juga dikenal memiliki tingkat keterlibatan sosial yang tinggi, yang tercermin dari partisipasi lebih dari 5.000 mahasiswa dalam program Kuliah Kerja Nyata berbasis pemberdayaan masyarakat. Tingginya partisipasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya aktif secara akademik, tetapi juga terlibat dalam praktik sosial yang berkaitan dengan isu-isu masyarakat.

Di sisi lain, lingkungan UIN SGD Bandung memiliki ekosistem organisasi mahasiswa yang dinamis, baik dalam bentuk organisasi intra kampus seperti Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa (SEMA), serta Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Adapun organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Selain itu, terdapat pula puluhan organisasi daerah yang aktif, yang menunjukkan tingginya intensitas interaksi dan diskursus di kalangan mahasiswa (Alfadilah, 2017).

Dalam penelitian ini, mahasiswa aktivis dipahami sebagai mahasiswa yang sedang atau pernah terlibat sebagai pengurus maupun anggota aktif dalam organisasi kemahasiswaan intra dan ekstra kampus. Keterlibatan tersebut memberikan pengalaman dalam mengikuti diskursus publik, menyampaikan gagasan, serta merespons berbagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, mahasiswa aktivis dipandang sebagai kelompok yang relevan untuk mengkaji pemaknaan terhadap komedi politik, karena mereka tidak hanya berperan sebagai audiens, tetapi juga sebagai individu yang terbiasa berinteraksi dengan isu-isu sosial dan politik secara lebih aktif dan reflektif.

Kondisi tersebut menjadikan mahasiswa aktivis UIN SGD Bandung sebagai kelompok yang memiliki tingkat keterlibatan tinggi terhadap isu sosial dan politik, serta memiliki pengalaman dalam ruang diskursus publik. Dengan demikian, mahasiswa aktivis dipandang sebagai subjek yang relevan untuk mengkaji bagaimana komedi politik dimaknai, karena mereka tidak hanya sebagai audiens, tetapi juga sebagai individu yang terbiasa berinteraksi dengan wacana sosial dan politik secara aktif.

Sejauh ini, penelitian mengenai komedi politik di Indonesia masih didominasi oleh analisis teks yang berfokus pada isi pesan dan bentuk kritik yang disampaikan oleh komedian. Sementara itu, kajian yang menempatkan audiens sebagai subjek aktif dalam memaknai komedi politik masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks mahasiswa sebagai kelompok yang memiliki potensi literasi politik yang cukup tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana komedi politik dimaknai oleh audiens, serta bagaimana dilema makna antara edukasi politik dan normalisasi kritik terbentuk dalam proses resepsi tersebut.

Secara umum, kajian mengenai komedi politik di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan analisis teks dan wacana yang menitikberatkan pada isi pesan, teknik humor, serta posisi ideologis komedian. Pendekatan ini cenderung memosisikan komedi sebagai produk budaya yang maknanya dapat ditelusuri dan ditentukan terutama melalui pembacaan terhadap teks pertunjukan, seolah-olah pesan politik yang disampaikan bersifat seragam.

Sementara itu, penelitian yang membahas komedi sebagai medium edukasi politik kerap berangkat dari asumsi normatif bahwa humor memiliki daya efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik audiens. Asumsi tersebut jarang dikaji melalui pengalaman empiris audiens secara langsung, sehingga keragaman cara audiens memaknai komedi termasuk kemungkinan munculnya sikap apatis, resistensi, atau sekadar penerimaan sebagai hiburan belum banyak mendapatkan perhatian.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat celah penelitian dalam memahami komedi politik sebagai ruang negosiasi makna, di mana pesan politik tidak berhenti pada proses produksi oleh komedian, tetapi terus dinegosiasikan melalui pengalaman dan latar sosial audiens. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengadopsi pendekatan resepsi audiens dalam kerangka komunikasi budaya, sehingga mampu menangkap bagaimana komedi politik dimaknai sebagai sarana edukasi politik, sekaligus mengungkap batas-batas dan ambivalensinya dalam konteks sosial yang lebih spesifik.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran komedi politik dalam konteks komunikasi politik kontemporer di Indonesia, khususnya dalam kaitannya sebagai medium penyampaian pesan politik yang bersifat edukatif. Dengan menempatkan audiens sebagai subjek aktif, penelitian ini berupaya mengungkap bagaimana mahasiswa memaknai komedi politik tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ruang refleksi, kritik, serta negosiasi terhadap isu-isu politik yang disampaikan.

Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa efektivitas komedi sebagai sarana edukasi politik tidak bersifat tunggal dan linear, melainkan dipengaruhi oleh latar belakang sosial, pengalaman, serta kerangka nilai yang dimiliki audiens. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan untuk mengafirmasi secara normatif bahwa komedi politik selalu mampu meningkatkan kesadaran politik, melainkan untuk memetakan secara kritis potensi, batasan, serta ambivalensi komedi dalam membentuk pemahaman dan sikap politik audiens.

Selain memberikan kontribusi teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi budaya dan komunikasi politik di Indonesia, khususnya melalui pendekatan resepsi audiens terhadap komedi politik yang masih relatif terbatas. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi komedian, akademisi, dan aktor politik dalam memanfaatkan komedi sebagai medium komunikasi politik, agar tidak hanya menyederhanakan isu-isu politik, tetapi juga mampu mendorong terbentuknya pemahaman kritis dan kesadaran politik yang lebih substansial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mahasiswa aktivis UIN Sunan Gunung Djati Bandung memaknai komedi politik dalam *Special Show Mens Rea* karya Pandji Pragiwaksono?
2. Bagaimana dilema makna antara edukasi politik dan normalisasi kritik terbentuk dalam proses resepsi mahasiswa terhadap komedi politik tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan, sebagai berikut:

1. Menganalisis mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung memaknai komedi politik dalam *Special Show Mens Rea* karya Pandji Pragiwaksono melalui perspektif resepsi audiens
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan munculnya dilema makna dalam komedi politik, khususnya antara pemaknaan sebagai sarana edukasi politik dan sebagai bentuk normalisasi kritik politik di kalangan mahasiswa.

D. Manfaat Penelitian

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi politik dan komunikasi budaya, khususnya dalam memahami komedi politik sebagai bagian dari praktik budaya populer yang berperan dalam proses produksi dan negosiasi makna politik. Penelitian ini berupaya memperkaya perspektif teoritis dengan menempatkan audiens sebagai subjek aktif melalui pendekatan resepsi audiens, sehingga tidak hanya berfokus pada teks atau intensi komedian semata, tetapi juga pada bagaimana makna tersebut dibentuk dan diinterpretasikan oleh audiens dalam konteks sosial tertentu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi keterbatasan kajian komedi politik di Indonesia yang selama ini masih didominasi oleh analisis wacana dan teks, dengan menghadirkan sudut pandang empiris yang lebih kontekstual. Melalui kajian terhadap pemaknaan mahasiswa, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai ambivalensi fungsi komedi politik, baik sebagai sarana edukasi politik maupun sebagai mekanisme normalisasi kritik politik. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara budaya populer, humor, dan politik dalam konteks masyarakat Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi komedian dan pelaku industri kreatif dalam memahami dampak serta batasan penggunaan komedi sebagai medium penyampaian pesan politik, khususnya dalam konteks edukasi politik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para

kreator dalam mempertimbangkan bagaimana pesan politik yang disampaikan melalui humor dimaknai oleh audiens yang beragam, tidak hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari proses pembentukan pemahaman dan kesadaran politik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi dan masyarakat luas, khususnya generasi muda, dalam mendorong sikap yang lebih kritis dan reflektif dalam mengonsumsi konten komedi politik di era digital.

E. Kerangka Berpikir

Perkembangan media digital telah mengubah pola komunikasi politik dari yang sebelumnya bersifat formal menjadi lebih informal dan berbasis budaya populer. Dalam konteks ini, politik tidak hanya disampaikan melalui institusi formal, tetapi juga melalui berbagai bentuk ekspresi budaya, salah satunya komedi politik. Komedi politik hadir sebagai medium alternatif yang menggabungkan unsur humor, satire, dan kritik sosial dalam menyampaikan pesan-pesan politik kepada audiens, khususnya generasi muda yang cenderung lebih tertarik pada konten yang ringan dan menghibur.

Salah satu bentuk komedi politik yang berkembang di Indonesia adalah *Stand-up Comedy*, khususnya *Special Show Mens Rea* karya Pandji Pragiwaksono, yang secara eksplisit mengangkat isu sosial dan politik melalui pendekatan humor dan satire. Dalam pertunjukan ini, pesan politik dikonstruksi oleh komedian melalui proses *encoding*, yaitu penyampaian makna dalam bentuk humor, ironi, dan kritik terhadap realitas politik. Namun, makna yang disampaikan tersebut tidak bersifat tetap atau tunggal, melainkan terbuka terhadap berbagai kemungkinan interpretasi.

Dalam perspektif komunikasi budaya, makna dibentuk melalui interaksi antara teks dan audiens. Hal ini sejalan dengan teori *encoding* dan *decoding* yang dikemukakan oleh Stuart Hall, yang menjelaskan bahwa audiens memiliki peran aktif dalam menafsirkan pesan berdasarkan latar belakang sosial, pengalaman, dan kerangka nilai yang dimilikinya. Dengan demikian, audiens tidak diposisikan sebagai penerima pasif, melainkan sebagai subjek yang secara aktif melakukan proses pemaknaan terhadap pesan yang diterima.

Dalam penelitian ini, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung diposisikan sebagai audiens yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu sebagai kelompok terdidik yang juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Karakteristik ini berpotensi memengaruhi cara mereka dalam memaknai komedi politik, khususnya dalam menilai batas antara kritik politik dan etika penyampaian. Oleh karena itu, proses *decoding* yang dilakukan oleh mahasiswa memungkinkan munculnya beragam interpretasi terhadap komedi politik yang disajikan dalam *Mens Rea*.

Proses pemaknaan tersebut kemudian mengarah pada munculnya ambivalensi atau dilema makna dalam komedi politik. Dilema adalah kondisi ketika seseorang atau suatu fenomena dihadapkan pada dua pilihan, makna, atau konsekuensi yang sama-sama mungkin terjadi namun saling bertentangan, sehingga sulit ditentukan satu posisi yang sepenuhnya benar atau ideal. Dalam konteks akademik, dilema tidak selalu berarti kebingungan, tetapi menunjuk pada ketegangan konseptual antara dua fungsi atau dampak yang berjalan bersamaan. Pada penelitian ini, istilah dilema digunakan untuk menggambarkan posisi komedi politik yang berada di antara dua kemungkinan: sebagai sarana edukasi politik karena mampu menyederhanakan isu-isu kompleks dan meningkatkan pemahaman audiens terhadap realitas politik yang mencerahkan di satu sisi, dan sebagai bentuk normalisasi kritik politik, di mana isu-isu politik dipersepsikan sebagai sesuatu yang biasa dan tidak lagi mendorong refleksi atau sikap kritis yang lebih mendalam yang berpotensi melemahkan keseriusan isu di sisi lain.

Edukasi politik adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, dan pembentukan sikap politik kepada masyarakat agar individu mampu memahami sistem politik, isu-isu publik, serta perannya sebagai warga negara secara sadar dan kritis. Edukasi politik tidak hanya berfokus pada peningkatan pengetahuan kognitif, tetapi juga mencakup pembentukan kesadaran, nilai, dan orientasi politik yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.

Menurut Miriam Budiardjo, pendidikan atau edukasi politik merupakan bagian dari proses sosialisasi politik yang bertujuan membentuk orientasi politik warga negara agar mampu memahami dan berpartisipasi dalam sistem politik yang

berlaku (Budiarjo, 2003). Edukasi politik membantu masyarakat mengenali hak dan kewajiban politiknya serta memahami mekanisme kekuasaan dan pengambilan keputusan politik. Almond dan Verba menjelaskan bahwa edukasi politik berperan penting dalam membentuk budaya politik, khususnya budaya politik partisipatif, di mana warga negara memiliki pengetahuan dan sikap yang mendukung keterlibatan aktif dalam proses politik. Melalui edukasi politik, individu tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang sadar dan kritis terhadap praktik politik.

Sementara itu, Rush dan Althoff memandang edukasi politik sebagai proses yang memungkinkan individu memperoleh informasi dan pengalaman politik, baik melalui lembaga formal maupun media, yang kemudian membentuk sikap dan perilaku politik seseorang. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan dan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya.

Normalisasi kritik adalah proses di mana fenomena, praktik, atau persoalan politik yang awalnya dianggap serius, problematik, atau kontroversial secara perlahan dipersepsikan sebagai sesuatu yang wajar, biasa, dan tidak lagi memicu kepekaan kritis masyarakat. Dalam proses ini, isu politik tidak dihilangkan, tetapi kehilangan daya kejut dan urgensinya karena terus-menerus direpresentasikan dalam bentuk yang ringan, repetitif, atau tidak menuntut respons reflektif.

Dalam perspektif komunikasi politik dan budaya, normalisasi politik sering terjadi melalui media dan budaya populer, ketika kritik terhadap kekuasaan disajikan sebagai konsumsi hiburan. Fiske menjelaskan bahwa representasi budaya dapat berfungsi ganda: membuka ruang kritik, namun sekaligus berpotensi menjinakkan makna kritis ketika pesan tersebut diserap sebagai rutinitas hiburan (Fiske, 1989). Dalam konteks ini, kritik politik yang ditertawakan berulang kali dapat kehilangan kekuatan politisnya.

Special Show "Mens Rea" karya Pandji Pragiwaksono dipahami sebagai teks budaya yang memuat pesan politik yang disandikan (*encoding*) oleh komedian melalui narasi personal, kritik hukum, serta penggunaan humor sebagai strategi komunikasi. Dalam proses *encoding* tersebut, terdapat klaim dan ambisi edukatif, yakni keinginan untuk memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu-isu politik dan hukum. Pesan politik yang disampaikan dalam komedi ini tidak bersifat

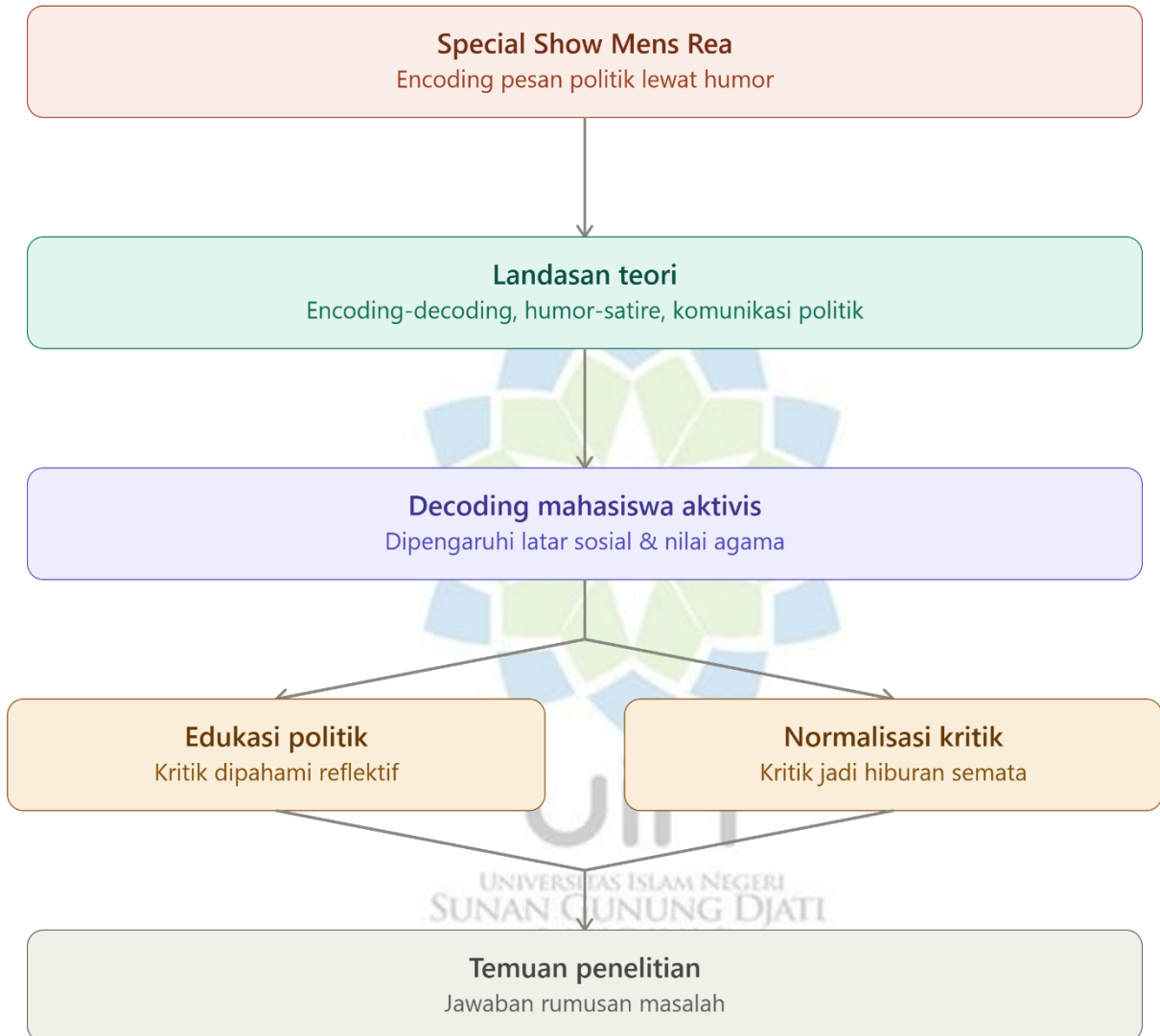
netral, melainkan dibentuk oleh sudut pandang dan pengalaman subjektif komedian.

Namun, makna dari pesan politik tersebut tidak secara otomatis diterima sesuai dengan maksud komunikator. Dalam perspektif komunikasi budaya, audiens dipahami sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses pemaknaan pesan. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagai audiens memiliki latar belakang sosial, pendidikan, dan nilai keagamaan yang memengaruhi cara mereka menafsirkan komedi politik dalam "*Mens Rea*". Proses pemaknaan ini berlangsung melalui mekanisme *decoding*, di mana audiens dapat menerima, menegosiasikan, atau menolak pesan politik yang disampaikan.

Proses *decoding* tersebut menghasilkan beragam bentuk resepsi. Sebagian mahasiswa dapat memaknai komedi politik sebagai sarana edukasi yang membantu mereka memahami isu politik dengan cara yang lebih sederhana dan mudah diakses. Sebagian lainnya mungkin memaknai komedi tersebut secara *ambivalen*, yakni memahami kritik politik yang disampaikan namun menganggapnya sebagai hiburan yang tidak menuntut refleksi atau sikap politik lebih lanjut. Bahkan, terdapat kemungkinan bahwa komedi politik justru dimaknai sebagai bentuk normalisasi kritik, di mana persoalan politik ditertawakan tanpa dimaknai secara serius. Perbedaan resepsi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual, seperti tingkat pengetahuan politik, pengalaman berinteraksi dengan isu politik, latar pendidikan, serta nilai-nilai kultural dan religius yang dimiliki audiens. Faktor-faktor ini berperan dalam membentuk posisi audiens dalam memaknai pesan politik, baik sebagai *dominant*, *negotiated*, maupun *oppositional reading*.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji bagaimana mahasiswa memaknai komedi politik dalam *Special Show Mens Rea*, serta bagaimana dilema makna antara edukasi politik dan normalisasi kritik terbentuk dalam proses resepsi audiens. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat komedi politik sebagai teks, tetapi sebagai ruang negosiasi makna yang melibatkan interaksi antara pesan, konteks, dan audiens.

Berikut susunan kerangka berpikir seperti gambar dibawah ini:



Berdasarkan kerangka berpikir di atas, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa komedi politik dalam *Special Show Mens Rea* karya Pandji Pragiwaksono merupakan media komunikasi yang memuat pesan-pesan politik yang dikonstruksi melalui humor dan satire. Pesan tersebut disandikan (*encoding*) oleh komedian dengan tujuan tertentu, seperti menyampaikan kritik sosial dan politik kepada audiens. Namun, makna yang terkandung dalam komedi politik tidak diterima secara seragam, melainkan melalui proses pemaknaan (*decoding*) yang dilakukan oleh audiens berdasarkan latar belakang sosial, pengalaman, pengetahuan, dan nilai-nilai yang dimiliki. Dalam penelitian ini, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung diposisikan sebagai audiens yang secara aktif menafsirkan pesan politik yang terdapat dalam *Mens Rea*.

Proses pemaknaan tersebut kemudian berpotensi menghasilkan dilema makna, yaitu kondisi ketika komedi politik dipahami dalam dua kemungkinan yang berbeda. Di satu sisi, komedi politik dapat dimaknai sebagai sarana edukasi politik yang membantu audiens memahami isu-isu politik secara lebih mudah dan menarik. Di sisi lain, komedi politik juga dapat dimaknai sebagai bentuk normalisasi kritik, ketika kritik terhadap persoalan politik diterima sebagai bagian dari hiburan sehingga kehilangan daya reflektif dan urgensi kritisnya. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi bagaimana mahasiswa memaknai komedi politik dalam *Mens Rea* serta menjelaskan posisi pemaknaan yang muncul di antara dua kutub tersebut, sehingga dapat dipahami bagaimana dilema makna terbentuk dalam proses resepsi audiens terhadap komedi politik.